



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Respon Politik Luar Negeri Federasi Rusia Terhadap
***Economic Warfare* Amerika Serikat Berdasarkan Analisis**
Stateness Level

Skripsi

Oleh

Celica Andini

2014330079

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Respon Politik Luar Negeri Federasi Rusia Terhadap
***Economic Warfare* Amerika Serikat Berdasarkan Analisis**
Stateness Level

Skripsi

Oleh

Celica Andini

2014330079

Pembimbing

Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Celica Andini
Nomor Pokok : 2014330079
Judul : Respon Politik Luar Negeri Federasi Rusia Terhadap *Economic Warfare* Amerika Serikat Berdasarkan Analisis *Stateness Level*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 28 November 2017
Dan dinyatakan LULUS

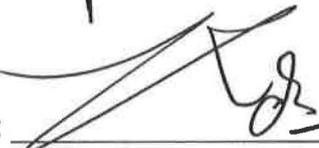
Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Sekretaris

Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si

: 

Anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Celica Andini

NPM : 2014330079

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Respon Politik Luar Negeri Federasi Rusia Terhadap *Economic Warfare* Amerika Serikat Berdasarkan Analisis *Stateness Level*

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian ini merupakan hasil karya tulis sendiri dan bukanlah karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 20 November 2017



Celica Andini

ABSTRAK

Nama : Celica Andini

NPM : 2014330079

Judul : Respon Politik Luar Negeri Federasi Rusia Terhadap *Economic Warfare* Amerika Serikat Berdasarkan Analisis *Stateness Level*

Sanksi ekonomi merupakan salah satu instrumen penekan kepentingan luar negeri Amerika Serikat. Lazimnya, keterpurukan ekonomi yang terjadi akibat sanksi akan memaksa negara target untuk tunduk terhadap permintaan negara pengirim sanksi, tetapi hal ini tidak berlaku untuk Rusia pada saat sanksi ekonomi dijatuhkan sebagai akibat dari aneksasi yang dilakukan Rusia ke Krimea pada tahun 2014 silam. Untuk memahami anomali tersebut, penelitian ini menggunakan *logic of appropriateness*/ logika sepatutnya yang merupakan bagian dari perspektif konstruktivisme. Serta, menitikberatkan fokus terhadap faktor-faktor di dalam formulasi konsep *stateness* yang kemudian terbagi menjadi tiga unsur, yakni otonomi pengambilan keputusan, kapasitas dan legitimasi dari Pemerintah Federasi Rusia sesuai dengan teori politik *economic statecraft* oleh Blanchard dan Ripsman. Penulisan penelitian dengan metode kualitatif ini merupakan penelitian berbasis dokumen dengan menggunakan teknik studi literatur dan pustaka untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana respon politik luar negeri Federasi Rusia dalam menghadapi implementasi *economic warfare* dari Amerika Serikat berdasarkan analisis *stateness level*?”. Penulis menemukan bahwa respon politik luar negeri Federasi Rusia sebagai balasan dari sanksi ekonomi yang di berikan Amerika Serikat bersifat resisten, konsisten, tegas dan menyeluruh berkat kontribusi dari *stateness level* yang dimilikinya.

Kata Kunci: Amerika Serikat, *Economic Warfare*, *Stateness*, Federasi Rusia, *Logic of Appropriateness*

ABSTRACT

Name : Celica Andini

NPM : 2014330079

Title : *Russian Federation Foreign Policy Response to United States Economic Warfare According to Stateness Level*

Economic sanctions is a part of United States foreign policy instrument as a mean to extend their foreign policy goals. Normally, consequences of economic sanction will eventually lead a state into cathastropic economical and political condition. Therefore, targeted state complience is inevitable. However, Russian Federation is an exception during United State Sanction relateing to their anexation to Crimea at first quarter of 2014. The existing research are less focused at the importance of domestic political dynamics as determining factors of Russian Federation response to United States economic warfare in a form sanctions. This research used logic of appropriateness as a part of constructivism and put the focus at domestic factors formulated inside stateness which segmented intoto three: decision making autonomy, capacity and legitimacy from Russian Federation Government in line with Blanchard and Ripsman political theory of economic statecraft. Qualitative writings of this research are document-based and used literature studies technique to answer a research question “How Russian Federation foreign policy respond United State implementation of economic warfare according to stateness level analysis?”. Researcher find Russian Federation foreign policy response as a reply to United State economic sanctions implied in resistant, consistent, assertive and holistic behaviour as their stateness level contributes to previously mentioned behaviour.

Key Words: United States of America, Economic Warfare, Stateness, Russia Federation, Logic of Appropriateness

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan draft penelitian yang berjudul “Respon Politik Luar Negeri Federasi Rusia Terhadap *Economic Warfare* Amerika Serikat Berdasarkan Analisis *Stateness Level*”. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat tempuh sebelum melanjutkan skripsi.

Penelitian ini membahas tentang pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal dalam pembuatan kebijakan luar negeri yang diformulasikan kedalam konsep *stateness* dan perannya terhadap embargo ekonomi/ *economic statecraft* yang dihadapi oleh Federasi Rusia semenjak tahun 2014 silam pasca aneksasi Federasi Rusia terhadap Krimea.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki draft ini sangat dibutuhkan. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si atas segala masukan-masukan yang sangat bermanfaat dan untuk kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Tidak lupa untuk orang tua dan keluarga tercinta serta teman-teman yang telah mendukung terselesainya penelitian ini.

Bandung, 27 Maret 2017.

Celica Andini

TOKENS OF GRATITUDE

*To **The Almighty Allah SWT**, for his kind grace to help and let me finish the over-destructive no good for either brain and health final assignment. This 3 past years has been tough, but I finally manage. Of course, without his blessings, nothing could I obtain in order to get my bachelor degree.*

*And on the top of my list, my lovable daddy, **Edhy Moestofa** who always manage to give his little time asking out of my conscience regarding uni progresses, telling me his wider empirical knowledge, showing his utmost concern towards growing up and reminding me to be a realistical human. My mother, **Nita Purbasari**, her patience and her prayer for my goodwill could never I return, of course her financial support are critical. I know I'd always difficult, but I love you both. **Aldy Novandhika**, either saviour and brother you mean a lot in this survival game, you will never be replaced by anyone, and no one ever be like you are. To **Cayla Gyasidhyta**, for being my personal cheerleader, I might not enough as a big sister but you are, often telling me that you proud of a failed me. **Ardan Primayodra Putra**, the calming system of mine, thank you for taking out anger of unsettled sister of yours. Without you, I will never feel right. **Sivan**, heaven's cat, my angel, we spent a very little time together, but you lifted my fatigue just right and his successor **Bocilo** which always stay by my side while working, u r so sweet baby :*. Uh oh **Nabila Alethea** is a part of me that cannot be separated too!! <3 And, of course ultra cool driver of mine **Mang Anton** for his loyalty bearing scattered yet tight agenda for this past 4 years and still counting ya mang!*

*Never in my wildest imagination landed in the hand of **Paulus Yohanes Nur Indro, Drs., M.Si**, a super recognized philosopher of International Relations to guide me throughout my rough journey in finishing my bachelor degree. I thankful for all his patience, guidance, time, life-related advice, his laugh and of course his trademark “dik” which inspired and motivate me to grow better but humble. And **Dr Yulius Purwadi Hermawan, M.A, Ph.D** for his virtuous making me a good researcher and student, you will never forgotten mas. Also for **Sammy Kanadi**, my role-model, and super smart lecturer of mine, i enjoy my time in university, I make mistake, I achieve, I got mad, I am beyond blessed, and thank you for reminding me that to be able to create mistake and different is precious.*

*I’m nervous, God is great and greater to conspire me to met **Tanya Lee Natalia** and eventually became ma uni best. We’ve been through a lot, there’s slump and even worse in our friendship, the roller coaster wasn’t enough to compare our mishaps. There are still a story untold, but believe me, the time we spent together is priceless and real. **Agatha Lydia Nathania**, long-lost and found friend of mine, “panutanque” a girl without limit, I cannot say anything but thanks for a splendid quality of ya’ ears hearing to be able to listen on complaint, your neat and “make sense” advice and of course your companion ehe. To whom it may concern #tsah ma gurl **Adriana Anjani, Haifa Hafiyanti Susetyo, Nathaya Mahasadhu Anandipa, and Amy Debora** you add a bright colour in a colourless life of mine.*

*Whoooo **Reyhan Karim Irawan!!** My swissie confederation broken buddies ~ a uni brother (wasn’t sure older or younger tho), this letter of gratitude wouldn’t complete without mentioning how patient, wise and orthodox you were*

lol I reaaaalllyyy like you!!! keep fluffy and ain't bae if bae aint pray ! And of course “Advis” army, especially **Ivan Samuel Alvarta and **Michael Putra** a guy friend also good-for-chin supplement who always in support filling my insight about politics, world and either Russia or USA. See you guys when we able to create our kwetiau kingdom with our own.*

*The time I spent with HNMUN 2017 is ... very limited. But they totally change a shy and “not really a stage person” like me to actually be able to speak my mind in front of the collection of ambitious person in the world! To **Aiqinea Yonel Tarigan**, **Regina Rima Rianti** (whom actually her finals are my guidance), **Ria Ellysa**, **Alya Nurshabrina**, **Sharon Margriet**, and **Timothy Ariel Wijaya**. I believe we will be on the top, or at least we are a person of our mind. Hope that we will again came by to those gorgeous mansion in Boston together xD. Oh and the advisor of course **Bang Aknolt Kristian Pakpahan**, dozen thank for a healthy and unique suggestion along the way until we back to Indonesia still.*

*Virtual friend who always been my backbone, **Faizal Akbar**. WHOEE MATUR SUWUN! Your horrifying babble, you know, honestly giving another weird motivation to finish this assignment. The one who waits a busy me to come, cat advisor, the figure whom I concern myself as wacky yet “a kind of” adorable at throwing sarcasm. To **Alexandra Jessica**, **Josiah Guvani**, and **Winda Dwipattdiana** please never change. I really like how awkward conversation going while us talking haha.*

*I’m living a California dream while a letter of acceptance on **Indonesia Stock Exchange** came by and hire me as their intern. And, I never be the luckiest to be admitted in Lower Level (oh it’s the lowest floor on the building, not the*

lowest in another thing, their jokes are the best tho). Accepting, a wormy person like me as their colleague is beyond my imagination. Especially to PPIP and OPP division whom has been a home for me. A person inside it **Menur Larasati, Via Yolanda, Intan P. Virginia, Novianty Yasril, Pusparini, Aninda Hastari, mas Aris B. Triwahyudi, Wahyu Nugroho** the baby shark and CUTEEST supervisor **Om Henry Ratdithyo**. And to the circle of ma office desk (my diary laughing concerto); **Kiki Ananda, mba Yayuk Sri Wahyuni, and Merry Kusuma Dewi**. Also **dapur mamah Evah** who been meritorious filling a nutrition for this drained brong along the writing. I hope I will be back soon, or if i'm not, i'm sure I'll be back as another interruption ~

To the person unwittingly crossed path with mine, with capability of multi-tasking and multi-reverse effect in my life, as either pain and painkiller, the good and the bad boy, a religious boy as well as a sinner, loving and hating lovers, decisive and deceptive partner et cetera, **Fuad Aly Azmi**. The difference was huge, but we working towards those dream we dreamt. We shouldn't walking on the same pace, go in a full speed. I will catch up to you, and so do you too. The heart, mind and soul was there for these past one year and ahead. I am improving to be a better companion, and thank you for ... everything you unexpectedly give me <3

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
<i>TOKENS OF GRATITUDE</i>	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.2.1. Pembatasan Masalah.....	6
1.2.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian	7
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran.....	12
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	28

1.6.1	Metode Penelitian	28
1.6.2	Teknik Pengumpulan Data	29
1.7	Sistematika Pembahasan	30
BAB II: STATENESS LEVEL FEDERASI RUSIA		32
2.1	Stateness Federasi Rusia	32
2.2	Kajian Unsur <i>Stateness</i> Terhadap Situasi Empiris Federasi Rusia	33
2.2.2	Kapasitas Federasi Rusia	38
2.2.3	Legitimasi Vladimir Putin dimata Rakyat Federasi Rusia	44
2.3	<i>Significant Stateness</i> Federasi Rusia.....	48
BAB III: IMPLEMENTASI <i>ECONOMIC WARFARE</i> AMERIKA SERIKAT TERHADAP RUSIA TAHUN 2014.		50
3.1	Esensi, Strategi dan Tujuan <i>Economic Warfare</i> Amerika Serikat	50
3.2	Eksekusi Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Ke Rusia Tahun 2014.....	56
3.2.1	<i>Executive Order</i> : EO 13660 (6 Maret 2014).....	57
3.2.2	<i>Executive Order</i> : EO 13661 (17 Maret 2014).....	59
3.2.3	<i>Executive Order</i> : EO 13662 (20 Maret 2014).....	60
3.2.4	<i>Executive Order</i> : EO 13685 (19 Desember 2014)	63
3.3	Pengaruh Implementasi <i>Economic Warfare</i> terhadap Federasi Rusia	64
3.3.1	Pengaruh Sanksi Terhadap Perekonomian Federasi Rusia	64
3.3.2	Pengaruh Sanksi Ekonomi terhadap Politik Domestik dan Luar Negeri Rusia.....	66
BAB IV: Respon Politik Luar Negeri Federasi Rusia Terhadap <i>Economic Warfare</i> Amerika Serikat Berkaitan dengan <i>Stateness Level</i>.....		69
4.1	Resistensi Rusia terhadap Sanksi Ekonomi Amerika Serikat	70

4.2 Sifat Dasar <i>Economic Warfare</i> dalam Perspektif Umum	74
4.3 Asesmen Empiris Aneksasi Rusia Pada tahun 2014	76
4.3.1 Inefisiensi <i>Raw Economic Stimuli</i> dan <i>Modified Stimuli</i>	76
4.3.2 Faktor Domestik/ Kelompok Kepentingan Domestik.....	80
4.4 <i>Stateness</i> Federasi Rusia dalam Menghadapi <i>Economic Warfare</i>	
Amerika Serikat	83
4.5 Intervensi Faktor-faktor Internasional Terhadap Stimulus Politik	89
4.5.1 ISIS dan Jatuhnya Harga Minyak Dunia.....	89
4.5.2 Dukungan BRICS dan Asia Tengah	92
4.5.3 <i>Isolasi Negara-negara Barat</i> dari G8 sampai Olimpiade	94
4.6 Peran Stimulus Ekonomi dan Politik terhadap Keputusan Rusia dalam	
Meresistensi <i>Economic Statecraft</i>.....	99
BAB V: KESIMPULAN	103
DAFTAR PUSTAKA	109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Teori Politik <i>Economic Statecraft</i> (Mempengaruhi Sikap Domestik)	26
Grafik 2.1 Anggaran Pemerintahan Rusia (2006 – 2016)	39
Grafik 2.2 Outflow Emigrasi Federasi Rusia	44
Grafik 2.3 Kepercayaan Warga Rusia Terhadap Vladimir Putin	47
Gambar 4.1 Keterangan Asesmen Fakta Empiris Kedalam Teori Politik dari <i>Economic Statecraft</i>	69
Gambar 4.2 Hubungan Antar Elemen Politik Rusia dalam Menghadapi <i>Economic Statecraft</i> Amerika Serikat	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perspektif Umum Mengenai Economic Statecraft	16
Tabel 1.2 Evaluasi Terhadap Stateness Negara; <i>DM Autonomy</i>	23
Tabel 1.3 Evaluasi Terhadap Stateness Negara; <i>Capacity</i>	24
Tabel 1.4 Evaluasi Terhadap Stateness Negara; <i>Legitimacy</i>	25
Tabel 2.1 Evaluasi Stateness Federasi Rusia	48
Tabel 3.1 Sanksi Amerika Serikat Terhadap Negara-Negara di Dunia	55
Tabel 3.2 <i>Inner Circle</i> Presiden Vladimir Putin	62
Tabel 4.1 Negara-negara yang Memberi Sanksi Susulan Kepada Rusia	74

DAFTAR SINGKATAN

BRICS	Brazil, Russia, India, China, South Africa
CBR	<i>Central Bank of Russia</i>
E.O	<i>Executive Order</i>
EU	<i>Europe Union</i>
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
IEEPA	<i>International Emergency Economic Powers Act</i>
ISI	Industrialisasi Substitusi Impor
ISIS	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
KGB	<i>Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti</i>
LGBT	<i>Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender</i>
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NEA	<i>National Emergencies Act</i>
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>
OFAC	<i>Office of Foreign Assets Control</i>
PD	Perang Dunia
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i>
SVR	<i>Sluzhba Vneshney Razvedk</i>
UN	<i>United Nations</i>
UNSC	<i>United Nations Security Council</i>
WMD	<i>Weapon of Mass Destruction</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Federasi Rusia dan Amerika Serikat secara *de facto* masih diakui sebagai negara terkuat di dunia, berdasarkan survei yang di buat oleh *business insider* Amerika Serikat menempati urutan pertama, yang kemudian diikuti oleh Rusia, Tiongkok dan kemudian India¹. Federasi Rusia sendiri sampai saat ini masih memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi situasi politik internasional yang didapat dari hak veto, *nuclear arsenal* dan angkatan militernya dibawah pimpinan Vladimir Putin² meskipun diklaim oleh Nixey selepas Perang Dingin berakhir, kekuatan Rusia menurun secara signifikan. Walaupun tidak sebesar kekuatan politik dan militernya, ekonomi Rusia masih mampu mempengaruhi dinamika ekonomi Uni Eropa dan ex-member dari negara-negara Uni Soviet³. Namun, Federasi Rusia dinilai masih belum bisa menandingi kekuatan ekonomi Amerika Serikat meski dalam hal militer dan senjata nuklir perbedaannya sangat tipis.

¹ Jeremy Bender, "The 11 Most Powerful Militaries In The World," Business Insider, April 23, 2014, , accessed October 12, 2017, <http://www.businessinsider.com/11-most-powerful-militaries-in-the-world-2014-4/?IR=T>.

²James Nixey, "Is Russia still a key world power?" BBC News, December 21, 2015, , accessed September 20, 2017, <http://www.bbc.com/news/world-europe-34857908>.

³ William H. Cooper. U.S. Congressional Research Service. *Russia's Economic Performance and Policies and Their Implications for the United States*. Rept. RL34512. CRS Report, 2009.

Amerika Serikat merupakan negara yang berambisi untuk menjaga ketertiban dan stabilitas di dunia⁴. Tanggung jawab ini timbul pasca kemenangan tunggal yang diraih pada saat Mikhael Gorbachev memutuskan untuk menghentikan perang dingin pada akhir tahun 1990. Menurut Moravcsik dan Milner, melihat dari *power* yang dimiliki Amerika Serikat baik dari sisi ekonomi, politik, militer, sosial maupun budayanya, negara ini pantas untuk mengemban kewajiban tersebut. Peran dan *power* ini juga memberikan legitimasi terhadap Amerika Serikat untuk meregulasi sebagian besar negara-negara di dunia seperti Eropa Barat dengan menggunakan instrumen dan strategi (*statecraft*) kebijakan luar negeri yang dimilikinya; organisasi internasional (WTO, UN), opini publik internasional, (CNN, FOX News) kekuatan ekonomi (GDP, PPP, *Trade Balance*, Sanksi, Insentif), ideologi demokrasi dan juga kapabilitas militer (NATO, *US Troops*)⁵. Dengan demikian, sulit bagi negara-negara kecil untuk tidak tunduk terhadap kepentingan Amerika Serikat karena konsekuensi yang diberikan biasanya akan berdampak cukup besar terhadap pemenuhan kewajiban negara dalam perlindungan warga negaranya baik secara internasional maupun domestik.

Aneksasi Federasi Rusia terhadap Krimea, sebuah wilayah kecil di sebelah timur Ukraina⁶ dan berada dibawah kedaulatan negara tersebut merupakan salah satu kejadian yang mendorong Amerika Serikat untuk menggunakan sanksi ekonomi. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling sering menggunakan sanksi ekonomi dan finansial dibanding negara lainnya, EU berada

⁴Federal Advisory Committee, Report on U.S.-Russia Relations, report (International Security Advisory Board, 2014).

⁵Helen V. Milner and Andrew Moravcsik, Power, interdependence, and nonstate actors in world politics (Princeton, N.J: Princeton University Press, 2009).

⁶ Anna Dolya, "The annexation of Crimea: Lesson for European Security," *Robert Schuman Foundation European Issues* 382 (February 23, 2016):.

di urutan kedua⁷. Sanksi ini adalah perwujudan dari “power” tersebut. Penggunaan *power* akan memaksa sebuah negara untuk mengikuti kehendak negara-negara lain yang memiliki kapabilitas material lebih tinggi. Meskipun, permasalahannya seringkali diluar konteks ekonomi, bisa saja permasalahan sosial, politik atau bahkan permasalahan yang masuk kedalam dimensi internal sebuah negara yang menarik perhatian internasional serta memaksa aktor eksternal untuk masuk dan ikut mengambil peran dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Jadi, hubungan antara sanksi dan konflik, adalah hubungan sebab-akibat. Konflik adalah sebab dan sanksi adalah akibatnya, sedangkan instabilitas yang terjadi adalah ekstensi atau perpanjangan dari sebab tersebut.

Federasi Rusia sebagai salah satu pelaku ekonomi internasional yang merupakan bagian dari struktur ekonomi dunia tidak luput dari krisis akibat dari sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Rusia mengalami krisis finansial terbesar di tahun 2014 silam, setelah adanya aktor-aktor internasional yang memberi tekanan ekonomi terhadap Rusia terkait konsekuensi dari aneksasi Krimea, menjadikan perekonomian Rusia dalam posisi ekonomi yang sangat sulit⁸. Untuk terbebas dari masa-masa krisis, Rusia mengeluarkan kebijakan anti-krisis seperti pemberian pinjaman dalam negeri skala besar, pinjaman hipotek, dukungan terhadap industri otomotif dan dukungan untuk individu disabilitas⁹ sebagai wujud dari resistensi terhadap *economy warfare* – berupa sanksi yang dikirim oleh negara pengirim. Ada dua macam sanksi ekonomi yang dikirim

⁷Jonathan Masters, "What Are Economic Sanctions?" Council on Foreign Relations, August 7, 2017, , accessed September 7, 2017, <https://www.cfr.org/background/what-are-economic-sanctions>.

⁸Sergey Salushev, "Annexation of Crimea: Causes, Analysis and Global Implications," *Global Societies Journal* 2 (2014):.

⁹Alena Repkina, What Does Russian's 'anti-crisis plan' look like? 2016.

Amerika Serikat ke Federasi Rusia. Pertama adalah sanksi individual terhadap orang-orang penting di Rusia seperti Yuri Kovalchuck, pemegang saham terbesar di Bank Rossiya dan sanksi individual tersebut dilakukan dengan membekukan, aliran dana maupun akses finansial individu yang terdaftar di list sanksi Amerika Serikat. Kedua, ada juga sanksi sektoral yang mengarah kepada sektor tertentu seperti energi, agrikultur dan persenjataan. Sanksi ini melarang adanya aliran barang ataupun jasa baik ekspor maupun impor dari dan ke Federasi Rusia¹⁰.

Dalam beberapa literatur tertulis bahwa kekuatan ekonomi Rusia selalu melibatkan aspek *power* dalam konteks politik dan militer yang dimilikinya. Sehingga, utilisasi *power* dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam politik domestik Rusia secara otomatis mempengaruhi output kebijakan ekonomi di dalamnya. Darimana kekuatan tersebut dan motivasi apa yang dimiliki Federasi Rusia tersebut dalam ruang lingkup dinamika politik domestik didapatkan menjadi salah satu pokok bahasan untuk dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Krisis ekonomi ini bermula ketika Rusia menganeksasi Krimea pada bulan Maret 2014. Krisis yang diprakasai oleh Amerika Serikat dan kemudian diikuti oleh Uni Eropa sebagai negara pengirim. Sanksi yang diberikan merupakan sanksi yang bertahap, mulai dari penerapan sanksi terhadap bank milik Rusia dan juga perusahaan Rusia dan mem-blacklist beberapa anggota pemerintahan dan juga

¹⁰ Yeganeh Torbati, "U.S. sanctions companies, people over Russia actions in Ukraine," Reuters, December 20, 2016, , accessed October 12, 2017, <https://www.reuters.com/article/us-usa-sanctions-russia/u-s-sanctions-companies-people-over-russia-actions-in-ukraine-idUSKBN1492AH?il=0>.

perusahaan tertentu (terutama Rosneft, Transneft dan Gazprom)¹¹. Sehingga, bisa disebutkan bahwa sanksi ini memiliki jangkauan multilateral.

Krisis ekonomi Rusia pada tahun 2014 berdampak cukup signifikan terhadap instabilitas perekonomian makro di negara tersebut. Pasar yang kian lesu, pesimistis rakyat dan institusi ekonomi terhadap kebijakan yang dibuat oleh Kremlin dan juga stok sumber daya yang menipis. Jatuhnya harga rubel ke angka 80 dan 100 rubel /kurensi merupakan pertanda awal yang mengesahkan bahwa perekonomian Rusia sedang dalam masa krisis, ketika itu Central Bank of Russia (CBR) mengeluarkan kebijakan dan bahkan berusaha untuk mengintervensi dengan mengeluarkan dana lebih dari US \$8 Milyar, namun hal itu tidak menekan angka depresiasi yang terjadi di Rusia saat ini¹²

Pada umumnya melihat keterpurukan yang terus berlanjut meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya restorasi perekonomian umumnya, pilihan yang paling rasional adalah untuk *comply* dengan tuntutan negara pengirim sanksi, Amerika Serikat. Namun, Federasi Rusia tetap memperlihatkan resistensinya terhadap *economic statecraft* negara pengirim. Hal ini menjadi anomali, ketika umumnya kegagalan negara target dalam memenuhi stabilitas dan kepentingan ekonominya dianggap sebagai titik mati dari resistensi sebuah negara terhadap *economic statecraft*¹³. Selain itu, apabila kepentingan strategis saja yang menjadi motif Federasi Rusia untuk menganeksasi Krimea, hal ini tidak bisa menjelaskan kegagalan Boris Yeltsin pada saat mencoba untuk merubah Rusia

¹¹Tim Daiss, "Prolonged Sanctions Rip Into Russian Economy, Causing Angst For Putin." Forbes, August 19, 2016. diakses 20 Februari 2017, <https://www.forbes.com/sites/timdaiss/2016/08/19/prolonged-sanctions-rip-into-russia-causing-angst-for-putin/#17775f8939e5>.

¹²Adam Eberhardt, *The Economic and Financial Crisis in Russia; Background, Symptoms and Prospects for the Future*, (Centre for Eastern Studies, February 2015).

¹³Daniel W. Drezner, *The Sanctions Paradox: Economic Statecraft and International Relations*, (Cambridge, NY: Cambridge University Press, 2000). Hal. 5

menjadi negara yang lebih terbuka. Sehingga, muncul asumsi bahwa motivasinya bukanlah terhadap kepentingan ekonomi ataupun kebijakan strategis semata. Ada pertimbangan politik, identitas serta hubungannya dengan birokrasi politik dan dukungan rezim di dalam negara tersebut. Yang artinya, dimensi domestik mengambil peran cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, serta menentukan perilaku sebuah negara terhadap urusan dalam dimensi eksternal. Kemudian, *stateness* muncul sebagai simplifikasi dari kompleksitas politik dan kapabilitas domestik sebuah negara yang bersifat intermestik dengan kebijakan politik luar negeri.

1.2.1. Pembatasan Masalah

Fokus di dalam penelitian ini adalah Pemerintah Federasi Rusia sebagai subyek penelitian beserta tingkat *stateness* yang dimilikinya sebagai elemen utama dalam penentuan sikap Rusia terhadap suatu permasalahan internasional. Penelitian ini membahas *stateness* yang meliputi faktor-faktor, baik dalam ruang lingkup domestik maupun internasional, pendorong ataupun penghambat lain sebagai penentu tingkatan *stateness* yang dimiliki Pemerintah Federasi Rusia. Meskipun ada sanksi-sanksi dari negara lain seperti Uni Eropa dan negara aliansi Barat lainnya, namun penelitian selanjutnya akan lebih rinci dalam membahas *economic statecraft* Amerika Serikat berupa sanksi ekonomi.

Fokus periode penelitian ini, terutama dimulai dari kuartal awal tahun 2014 ketika sanksi pertama Amerika Serikat terhadap Rusia ditetapkan sampai dengan tahun akhir 2016 ketika isu-isu sanksi Rusia sebgaiian besar masih disebabkan oleh aneksasi Rusia terhadap Krimea. Karena pada permulaan tahun

2017, sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap Federasi Rusia banyak yang berkaitan dengan intervensi Federasi Rusia terhadap pemilihan Presiden Amerika Serikat. Namun, tidak terbatas pada adanya kejadian-kejadian diluar periode waktu tersebut apabila memiliki keterkaitan ataupun sebagai informasi sampingan didalam mencari jawaban dari pertanyaan penelitian.

1.2.2. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang diutarakan, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam pembahasan penelitian ini adalah:

“Bagaimana respon politik luar negeri Federasi Rusia terhadap *economic warfare* Amerika Serikat berdasarkan analisis *stateness level*?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan respon politik luar negeri Federasi Rusia dalam menghadapi implementasi *economic warfare* dari Amerika Serikat berdasarkan analisis *stateness level* yang dimiliki oleh Pemerintah Federasi Rusia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- Bagi Analis Kebijakan Luar Negeri/ Ekonomi

Penelitian ini dapat digunakan untuk memetakan dinamika politik dan perekonomian yang terjadi di Federasi Rusia. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan oleh para analis kebijakan luar negeri dan perekonomian sebagai referensi untuk mengetahui pola politik perekonomian Federasi Rusia, pemain

kunci dalam pemenuhan kepentingan Federasi Rusia agar dapat menjadi mitra strategis yang bermanfaat bagi Indonesia.

- Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk menemukan informasi mengenai perekonomian Federasi Rusia. Penelitian ini juga dapat menjadi patokan atau referensi untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik atau tema yang serupa.

1.4 Kajian Literatur

Domestic Politics and International Conflict – Michelle R. Garfinkel dalam *The American Economic Review* 84, no. 5 (December 1994): 1294-309

Tulisan Michelle R. Garfinkel menganalisa interaksi antara politik domestik dengan konflik internasional. Garfinkel menemukan bahwa adanya kompetisi antara partai politik memberikan bias negatif terhadap pengeluaran anggaran dan distribusi budget negara. Juga, menjelaskan bahwa kepentingan dari pemerintah yang ditentukan oleh rakyat yang akan melakukan pemilu. tulisan ini juga menitikberatkan terhadap karakterisasi output dari kebijakan dimana kompetisi politik terjadi¹⁴. Artikel yang berjudul *Domestic Politics and International Conflict* ini menekankan terhadap hubungan politik domestik, khususnya birokrasi pemerintahan negara yang menganut sistem politik demokrasi dalam pengaruh dari konflik internasional yang terjadi saat itu dan implikasinya terhadap anggaran negara dan utilisasi angkatan bersenjata disebuah negara. Sedangkan, tulisan peneliti mengambil contoh politik domestik yang

¹⁴ Michelle R. Garfinkel, "Domestic Politic and International Conflict," *The American Economic Review* 84, no. 5 (December 1994): 1294-309.

terjadi di negara sosialis, *stateness* yang lebih berorientasi kepada kepentingan pemerintah dibandingkan institusi politik dan penekanan dalam dimensi ekonomi lebih mendalam yang berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh Garfinkel. Meski sama-sama menganalisis motivasi terhadap kekuatan dalam pemerintahan dan luaran dalam kebijakan ekonomi sebuah negara.

On The Effects of International Economic Sanctions: With Example from the Case of Rhodesia – Johan Galtung dalam *World Politics* 19, no. 3 (April 1967): 378-416

Tujuan dari penelitian Galtung adalah untuk mendapatkan sebuah pola mengenai mekanisme sosial dan psikologikal tentang embargo ekonomi pada saat hal tersebut peroprasi daripada harus bergantung terhadap retrospeksi. Galtung menilai bahwa, economic statecraft hanya memiliki dua macam tujuan; membuat negara target untuk menuruti beberapa norma-norma penting yang diinginkan negara pengirim ataupun menghapus beberapa nilai yang dimiliki negara target. Namun, Galtung tidak terlalu kaku terhadap anggapan ini, karena menurutnya hukuman terkadang memberikan efek yang berbeda tergantung obyek tersebut. Dan faktor lain yang memungkinkan keberhasilan economic statecraft sebuah negara adalah vulnerability. Galtung menganalisis sanksi ekonomi secara gradual, mulai dari pemerintah, individu-individu penting, *big bussiness*, masyarakat dan situasi serta kondisi kapan sanksi dapat bekerja, atau tidak¹⁵. Tulisan Galtung merupakan salah satu pelopor dalam penelitian mengenai sanksi ekonomi dan

¹⁵*On The Effects of International Economic Sanctions: With Example from the Case of Rhodesia*, p. 380.

juga *economic statecraft* jadi obyek kajiannya sangat luas, penjelasannya pun kian general dengan berbagai macam kondisi “apabila”.

Penelitian ini, membahas *economic statecraft* dalam versi yang lebih sederhana, dan memfokuskan terhadap bagaimana *compliance* sebuah negara dilihat dari politik domestiknya, dan berorientasi lebih kepada sudut pandang negara penerima sanksi dibandingkan pengirim sanksi. Selain itu, metode yang digunakan juga berbeda. Meskipun sama-sama kualitatif tetapi elemen yang di bahas tidak sama, seperti depresiasi nilai yang ada didalam teori Galtung, adapula komponen yang mirip seperti disintegrasi politik namun tidak ada tolak ukur untuk menilai kapan. Terakhir, Galtung memiliki sudut pandang liberal yang berorientasi pada nilai-nilai demokratis tentang kerjasama dan juga *compliance without punishment*, dengan tidak menghiraukan faktor dari struktur sosial yang ada.

Economic Sanction, Leadership Survival and Human Rights - Cristiane Carneiro dan Dominique Elden dalam U. Pa. J. Int'l L. 30, no. 3 (2009): 969-98.

Dalam tulisan *Economic Sanction, Leadership Survival and Human Rights* mengatakan landasan untuk mempelajari sanksi ekonomi adalah bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi dalam pemenuhan negara taget tersebut. Cristiane Carneiro dan Dominique Elden menilai sanksi ekonomi dinilai tidak banyak berpengaruh terhadap pemerintahan yang bersifat autokratik. Oleh sebab itu, *survival* seorang pemimpin merupakan fokus dari penelitian ini. penulis menggunakan pengukuran terhadap pemenuhan tanggung jawab seorang

pemimpin ke rakyatnya¹⁶. Dimensi human rights sangat kental dan mendalam didalam penulisan jurnal ini. selain itu penulis menggunakan studi kasus terhadap Fiji, Sierra Leone, Turki dan juga Pakistan. Sehingga, meski sama-sama mengukur survival dari kepemimpinan rezim/ pemimpin, namun tulisan yang saat ini peneliti buat sangat berbeda dari segi studi kasus dan juga dimensi yang dibahas oleh peneliti adalah dimensi birokratik dari pembuatan keputusan, tidak hanya pemenuhan hak asasi manusia saja.

A Theory of Economic Sanctions and Issue Linkage: The Roles of Preferences, Information, and Threats – Dean Lacy dan Emerson M. S. Niou dalam *The Journal of Politics* 66, no. 1 (Februari 2004): 25-42.

Dean Lacy dan Niou Emerson berpendapat bahwa untuk membangun sebuah teori mengenai sanksi ekonomi yang realistis harus melibatkan dua atau lebih isu-isu yang ada dan menggunakan keterkaitan diantara isu-isu tersebut kedalam sebuah '*game theory*'. Lalu, Lacy dan Niou membangun dua asumsi utama. Pertama, kedua pihak yang bertikai kemungkinan memiliki dua preferensi yang berbeda mengenai hasil akhir dari pertikaian. Kedua, pemain yang terlibat tidak mengetahui preferensi pemain lainnya.¹⁷ Jadi, argumennya adalah perbedaan outcome yang berujung kepada perbedaan kepentingan antara dua pemain tersebut, dan bagaimana sanksi ekonomi dapat 'memaksa' bukan 'memediasi' pertikaian tersebut.

¹⁶ Cristiane Carneiro, and Dominique Elden. "Economic Sanction, Leadership Survival and Human Rights ." *U. Pa. J. Int'l L.* 30, no. 3 (2009): 969-98.

¹⁷ Dean Lacy and Emerson M. S. Niou, "A Theory of Economic Sanctions and Issue Linkage: The Roles of Preferences, Information, and Threats," *The Journal of Politics* 66, no. 1 (February 2004):.

Penelitian ini juga menggunakan berbagai macam variabel oposisi biner yang pada umumnya ada didalam *game theory* contohnya, *compliance* >< *non compliance*, *sanctions* >< *no sanctions*, dan sebagainya. Model ini juga pada akhirnya memperlihatkan metode mana yang paling mungkin untuk menciptakan suatu keadaan yang diinginkan oleh negara pengirim dan strategi apa yang harus dipakai. Seperti, semakin besar volume koersi, maka target akan menuruti¹⁸.

Penelitian Lacy dan Niou dengan penelitian ini sama-sama membicarakan tentang strategi implementasi economic statecraft kenegara target, namun model yang digunakan sangat berbeda. Penelitian ini menganalisis secara kualitatif sedangkan penelitian Lacy dan Niou mengukur dengan metode kuantitatif/ *game theory*. Penelitian Lacy dan Niou juga lebih menekankan kepada strategi *economic statecraft* negara pengirim, preferensi dari outcome dan sangat realis. Dimana penelitian ini lebih memfokuskan terhadap resistensi terhadap *economic statecraft*, politik domestik dan konstruktivis.

1.5 Kerangka Pemikiran

Hubungan Internasional, menurut Viotti dan Kauppi adalah hubungan antar negara – ataupun orang-orang yang memiliki indentitas yang serupa yang lebih lanjut disebut sebagai “bangsa”.¹⁹ Didalam pembelajaran pengantar hubungan internasional sering sekali disebut sebagai bidang ilmu yang tengah beranjak dari multidisipliner menuju ke interdisipliner. Akar dari hubungan

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi, *International relations and world politics: security, economics identity* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2000).

internasional adalah interaksi yang ada antara dua negara atau lebih, kemudian dua term tersebut melanjutkan interaksi dari hubungan yang terbentuk²⁰.

Masih didalam buku yang sama, Viotti dan Kauppi menyebutkan bahwa keamanan negara dan juga *statecraft* merupakan sebuah proyeksi dari kepentingan, tujuan dan juga kekuatan dari sebuah negara²¹. *Statecraft* dapat diterjemahkan sebagai kombinasi dari instrumen kebijakan yang dimiliki oleh sebuah negara untuk mencapai tujuannya dalam sistem internasional²². Ada bermacam-macam instrumen dalam membangun *statecraft* sebuah negara, antara lain diplomasi, militer, teknologi dll. Penulis dalam penulisan ini mengartikan bahwa *statecraft* sebagai sebuah strategi untuk pemenuhan kepentingan satu negara ke negara lainnya, baik dalam bentuk insentif (*aid*) maupun koersif (*warfare*). Namun, karena pembahasan dalam tulisan ini seluruhnya adalah mengenai *economic warfare* yakni *economic statecraft* yang bersifat negatif dan koersif, maka selanjutnya istilah *economic warfare* akan digunakan penulis untuk menyebut obyek yang dimaksud.

Pasca perang dingin, negara-negara besar menghindari penggunaan kekuatan militer sebagai kekuatan untuk menekan negara lain dan merubah alur kebijakannya. Dalam hal ini, *economic statecraft* merupakan sebuah alternatif dari pertimbangan *over-destructive* tersebut²³. Sanksi hanya merupakan salah satu bagian dari *economic statecraft*, dimana sanksi-saksi itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian; *smart* dan *comprehensive*. Selain sanksi, ada juga insentif

²⁰ Plantan, Frank, "Multidisciplinary approaches, disciplinary boundaries, and institutional response in American higher education: A history of international relations as a field of study" (2002) - Dessertation

²¹ *International relations and world politics: security, economics identity*.

²² Pembelajaran Politik Global Amerika Serikat, oleh Putu Agung Nara Indra Prima Satya. 8 Maret 2015, Universitas Katolik Parahyangan.

²³ Steve Chan, and A. Cooper Dury. *Sanctions as Economic Statecraft*. (New York, United States: Palgrave Macmillan, 2000).

sebagai persuasi yang bersifat positif dari *economic statecraft* yang ditawarkan seperti *loan, grants, foreign direct investment*, melalui institusi-institusi keuangan/pembangunan ataupun melalui kurs.

Sanksi ekonomi disebut sebagai *two-game level*, karena tidak hanya melibatkan satu target dalam suatu negara²⁴. Dua level disini artinya, melibatkan dimensi domestik dan juga dimensi internasional. Selain itu, aktor yang terlibat bukan hanya negara, tapi pelaku-pelaku ekonomi didalam sebuah negara juga ikut terlibat karena semuanya memiliki kepentingan sendiri dan berbeda-beda. Dari sanksi ekonomi ada sebagian aktor yang merugi, namun ada juga beberapa sektor yang meraup keuntungan ketika sanksi di berlakukan, contohnya perusahaan-perusahaan dalam negeri yang berfokus terhadap produksi domestik, atau Industrialisasi Substitusi Impor (ISI). Sehingga, ada dua subyek dalam rangkaian sebuah sanksi ekonomi, yaitu negara pengirim sanksi dan juga target dari sanksi tersebut. keberhasilan dari penggunaan sanksi juga didasarkan oleh kekuatan koalisi antar dua negara tersebut²⁵. Ketika koalisi negara pengirim lebih kuat dibandingkan negara target, maka sanksi dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, apabila koalisi negara target lebih besar, sanksi tidak akan berlaku karena negara-negara tersebut dapat memperoleh dukungan dari koalisinya. Karena inilah, *economic statecraft* dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari penggunaan kekuatan dalam formasi kebijakan ekonomi.

Pemikiran ini dinilai sempit untuk memahami proses pembuatan kebijakan dan keputusan ketika terjadi *economic statecraft*. Hal ini kemudian dikritik oleh Blanchard dan Ripsman. Menurut mereka, tulisan mengenai *economic statecraft*

²⁴ Robert D. Putnam. *Institutional performance and political culture in Italy: some puzzles about the power of the past*. (Cambridge, MA: Center for European Studies, Harvard University, 1988).

²⁵ Steve Chan, p.4.

terlalu dibelenggu oleh perilaku para penulis seperti Hirschman yang membedakan analisis antara sanksi ekonomi dengan insentif ekonomi, serta tulisan-tulisan yang ada kurang memperhatikan dalam kapan dan dalam kondisi apa *economic statecraft* ini dapat mencapai tujuannya²⁶. Kedua penulis ini meyakini bahwa latar/ setting – kesempatan dalam keadaan tertentu menentukan hasil dari *economic statecraft*, juga dua elemen yakni sanksi dan insentif merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena, meski negara pemberi memberikan sanksi, bukan berarti negara tersebut tidak memberi insentif secara tidak sadar terhadap sektor lain seperti yang telah dikatakati oleh Putnam bahwa sanksi ekonomi adalah *two-game level*.

Baldwin berkata bahwa keberadaan motivasi domestik untuk mendukung menyusun *statecraft* sangat tidak efektif²⁷. Tulisan lain cenderung mengabaikan faktor politik domestik di negara target yang memiliki sampai terhadap keinginan negara tersebut untuk tunduk terhadap *statecraft*. Dapat dilihat bahwa pendapat arus besar seringkali melupakan dimensi domestik dalam penerapan ataupun pembuatan *economic statecraft*. Tulisan ini menyebutkan sebaliknya, bahwa *economic statecraft* memiliki dimensi domestik yang lebih signifikan terhadap sukses dan tidak suksesnya sebuah sanksi.

Penjelasan mengenai signifikansi politik domestik tidak dapat dijelaskan secara gamblang dengan menggunakan pendekatan umum seperti realis maupun ekonomi liberalis. Model pendekatan yang digunakan oleh Blanchard dan Ripsman di dalam teori politik dari *economic statecraft* adalah *conditionalist approach*, pendekatan ini tidak lazim digunakan dalam hubungan internasional.

²⁶ Jean-Marc F. Blanchard and Norrin M. Ripsman. *Economic Statecraft and Foreign Policy: Sanctions, Incentives and Target State Calculations*. (New York: Routledge, 2013).

²⁷ David A. Baldwin, *Economic Statecraft*, (Princeton: Princeton University Press, 1985).

Sehingga, sulit untuk menggunakannya kedalam penelitian ini dan elemen inti dari *conditionalist approach* adalah *salience* (ciri khas) dan *balance of capability* (keseimbangan kapabilitas)²⁸ identik dengan nilai-nilai inti dari konstruktivisme yaitu *identity* (identitas) dan *logic of appropriateness* yang merupakan hasil dari pemahaman intersubjektivitas. Oleh sebab itu, peneliti menafsirkan bahwa *conditionalist approach* yang digunakan sebagai pendekatan oleh Blancard dan Ripsman untuk memprediksi ketaatan sebuah negara terhadap *economic statecraft* dapat disejajarkan dengan *logic of appropriateness* yang merupakan elemen dari konstruktivisme.

Keduanya merupakan elemen penentu dari preferensi domestik yang tidak bisa dijelaskan secara statis, dan sama-sama berargumen bahwa *economic statecraft* (meski tidak disebutkan secara gamblang di dalam konstruktivisme) hanya dapat diterapkan secara efektif dalam kondisi domestik tertentu. Ekonomi liberalis dan ekonomi nasionalis/ realis memiliki pandangan berbeda yang disiangkat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Perspektif Umum Mengenai *Economic Statecraft*

Model	Perilaku Negara Terhadap Economic Statecraft
Ekonomi Liberalis	$Cost < benefits = state\ compliance.$
Realis	$Political\ reason > economic\ statecraft = \text{selalu gagal.}$
Konstruktivisme	$Illogical\ (non\text{-}significant\ stateness) = \text{Sukses}$ $Logical\ (significant\ stateness) = \text{Gagal}$

Diolah dari : *The Political Economy of International Relations* (Robert Gilpin) dan *The Logic of Appropriateness* (March & Olsen)

²⁸ A Political Theory of Economic Statecraft, hal. 377

Ekonomi liberalis pada dasarnya percaya bahwa perdagangan dan hubungan ekonomi merupakan akar dari perdamaian antar negara karena adanya mutual benefits yang diterima oleh negara-negara yang terlibat dan juga meningkatkan interdependensi antar negara²⁹. Meskipun para liberal percaya bahwa aktivitas ekonomi akan menambah power dan juga keamanan negara, mereka yakin bahwa tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah untuk memberi keuntungan terhadap konsumen secara individual³⁰. Trend setelah berakhirnya perang dunia kedua memperlihatkan bahwa *new international order* dilihat dari tingkat interdependensi antar negara, didalam kondisi ini suatu hal yang kompleks mengikat negara-negara yang terlibat untuk terus berinteraksi dan juga membuat otonomi negara menjadi terbatas³¹. Pandangan ekonomi liberalis selama hubungan interdependensi antar negara semakin erat maka hasil dari *economic statecraft* akan bergantung terhadap besaran ekonomi suatu negara dilihat dari *cost-benefitsnya*. Apabila, *cost* dari *economic statecraft* lebih besar daripada *benefits* yang akan didapat negara dari penolakan terhadap *economic statecraft*, maka negara akan memilih untuk tunduk terhadap negara pengirim.

Dilain pihak sudut pandang ekonomi nasionalis (realis/ merkantilis) menganggap bahwa negara merupakan satu-satunya aktor yang memiliki peran untuk mengatur dan melindungi perekonomian negara³². Gabungan ekonomi dan politik pada dasarnya bersifat konfliktual, negara akan berkonsentrasi terhadap *self-sufficiency* dengan memperoleh sumber daya untuk negaranya lalu

²⁹ Robert Gilpin and Jean Millis. Gilpin, *The Political Economy of International Relations* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1987).

³⁰ *The Political Economy of International Relations*, 41.

³¹ Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, and Fareed Zakaria, *Power and Interdependence* (Boston: Longman, 2012).

³² David N. Balaam and Bradford Dillman, *Introduction to International Political Economy* (S.I.: Routledge, 2015).

menjadikannya kekuatan untuk menciptakan dependensi negara lain, atau menciptakan *power relations* antara negara yang kuat dan lemah secara ekonomi³³. Kemudian, model ini berasumsi bahwa *economic statecraft* tidak akan pernah berhasil apabila bertujuan untuk mengganggu kebijakan strategis atau alasan politik lainnya³⁴. Realis tetap memusatkan konsentrasi negara terhadap povernya dalam masalah politik dan militer, masalah ekonomi tidak signifikan apabila mencoba mengintervensi urusan politik pada akhirnya, utilisasi militer merupakan solusi apabila terjadi kebuntuan dalam permasalahan ekonomi.

Selanjutnya, konstruktivisme percaya bahwa kapasitas manusia untuk merefleksikan dan atau belajar (dengan mengetahui, mengerti dan mengalami) memiliki pengaruh terbesar terhadap perilaku individu dan juga aktor-aktor sosial mengenai 'arti' dari apa yang dianggap benar³⁵. Karena itu, pengertian kolektif memberi masyarakat penjelasan mengapa sebuah hal terjadi dan mengindikasikan bagaimana mereka harus menggunakan kemampuan material dan power mereka untuk menghadapi hal tersebut. Konstruktivisme memberikan kita kemampuan untuk menteorisasi tentang hal-hal yang terlihat tidak memiliki keterkaitan namun sesungguhnya ada³⁶. Konstruktivisme yang percaya terhadap teorisasi disebut dengan konstuktivisme konvensional, penganutnya antara lain Alexander Wendt dan Emanuel Adler. Akan tetapi, tidak semua pemikir konstruktivisme setuju dengan pernyataan mengenai teorisasi. Pemikir konstruktivis seperti Maja Zehfuss meyakini bahwa konstruktivisme tidak dapat dibilang sebagai sebuah teori karena

³³ *The Political Economy of International Relations*, hlm. 33.

³⁴ *A Political Theory of Economic Statecraft*, hal. 377

³⁵ Emanuel Adler, "Seizing the Middle Ground: Constructivism in World Politics," *European Journal of International Relations* 3, no. 3 (1997): , doi:10.1177/1354066197003003003.

³⁶ Nicholas Greenwood Onuf, *Making sense, making worlds constructivism in social theory and international relations* (London: Routledge, 2013).

para kritikal konstruktivis sepertinya berpendapat bahwa klaim mengenai kebenaran tidak mungkin dapat dilakukan sebab tidak ada dasar dimana pemikir dapat menentukan mana yang benar, apa yang dikatakan sebagai sebuah kebenaran selalu menyambung ke sesuatu yang berbeda, kurang atau lebih dominan serta pemikiran tentang dunia³⁷. Hal ini yang kemudian menjadi akar dari debat berkepanjangan dalam pandangan konstruktivisme konvensional dan konstruktivisme kritikal³⁸. Namun, satu hal yang pasti adalah, struktur dari asosiasi manusia ditentukan oleh adanya *shared ideas* daripada kekuatan material dan identitas serta kepentingan dari aktor-aktor tersebut dikonstruksi oleh hal ini - *socially constructed, not given*³⁹. Segala variabel yang merupakan obyek penelitian dimata para akademisi hubungan internasional seperti kekuatan militer, perdagangan, institusi, domestic preference penting untuk diteliti karena memiliki social meanings yang dikonstruksi oleh sejarah, idea, norma dan juga kepercayaan atau kita sebut intersubektivitas⁴⁰.

Ada beberapa hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lainnya (1) Individual membentuk masyarakat dan masyarakat membentuk individual, (2) Agen membentuk peraturan dan begitupula sebaliknya, serta (3) peraturan membentuk institusi, lalu institusi membentuk sebuah masyarakat. Peraturan diikuti karena dilihat sebagai sesuatu yang natural, benar dan juga legal, individu menggeluti peran yang dimilikinya sebagai kewajiban yang terdapat didalam peraturan.

³⁷ Robert Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relation: Theories and Approaches*, Fifth ed. (United Kingdom: Oxford University Press, 2013), hlm. 215.

³⁸ *Introduction to International Relation: Theories and Approaches*, hlm. 227-228.

³⁹ Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*(Cambridge: University Press, 1999).

⁴⁰ Anne-Marie Slaughter, "International Relations, Principal Theories," Max Planck Encyclopedia of Public International Law: , accessed 2011.

Selanjutnya konstruktivisme mendistingksi pemikiran mengenai *logic of consequences*/ logika konsekuensi, dimana perilaku rasional dipilih dengan memaksimalkan kepentingan nasional yang lebih mirip dengan ekonomi nasionalis. Sedangkan, *logic of appropriateness*/ logika yang sepatutnya dimana rasionalitas di mediasi oleh norma-norma sosial dan identik dengan *conditionalist approach* milik Blanchard dan Ripsman. Penelitian ini hanya menggunakan *logic of appropriateness* sebagai turunan dari konstruktivisme. *Appropriateness*/ kepatutan yang dimaksud adalah apa yang di definisikan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang normal, benar, benar dan baik, tanpa, atau dengan perhitungan dari konsekuensi serta utilisasi yang telah di perkirakan⁴¹. Kurang lebih mirip dengan apa yang dikatakan dalam konstruktivisme bahwa sesuatu yang terkonstruksi secara sosial (*socially constructed*) dari hasil intersubjektivitas selalu memiliki arti sosial dibaliknya.

Kesamaan identitas, situasi dan juga tingkah laku bisa didasarkan oleh pengalaman, pengetahuan, intuisi dan juga dari *role expectation*⁴². *Stateness* adalah kemampuan negara dalam memenuhi *role expectation* dari masyarakatnya, sehingga *stateness* dan *logic of appropriateness* memiliki elemen yang sama. Dan didalam penelitian ini, *logic of appropriateness* merupakan nara hubung antara konstruktivisme dan juga *stateness* yang menjadi elemen untuk menentukan apakah sebuah *economic statecraft* sebuah negara sukses atau tidak.

Untuk menghubungkan dinamika politik domestik dan pengaruhnya terhadap hasil kebijakan luar negeri serta hubungannya dengan nilai sosial yang

⁴¹ James G. March and Johan P. Olsen, *The Logic of Appropriateness*, working paper no. WP 04/09, *Centre of European Studies*, University of Oslo (ARENA, 2009).

⁴² Theodore R. Sarbin and Vernon L. Allen, "Role Enactment, Audience Feedback, and Attitude Change," *Sociometry* 27, no. 2 (1964): , doi:10.2307/2785715.

terdapat di sebuah negara, penulis menggunakan teori yang dibangun oleh Blanchard dan Ripsman yang bertujuan untuk memperlihatkan bahwa sukses tidaknya *economic statecraft* ditentukan oleh *stateness* level dari sebuah negara⁴³. Menurut mereka, teori ini mengakui sanksi dan insentif ekonomi selalu mencoba untuk mempengaruhi pemerintah di negara target dengan memanipulasi kalkulasi ekonomi dari kepentingan domestik yang paling penting di negara tersebut, yang pada akhirnya mencoba untuk meyakinkan para pemimpinnya untuk merubah kebijakan yang telah di buatnya⁴⁴. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tujuan dari teori ini adalah untuk menonjolkan faktor politik domestik dalam wujud *stateness* tersebut.

Teori politik dari *economic statecraft* berangkat dari asumsi bahwa tujuan fundamental dari seluruh pemimpin politik adalah untuk menjaga posisi tawar kekuatan mereka - *position of power*. Masuk akal bila, tanpa adanya legitimasi kekuatan untuk memimpin, pemimpin bisa mencapai tujuan politik atau ideologi lainnya. Jadi, motivasi dan peran pemimpin terhadap power sangatlah penting, baik didorong oleh tujuan moral atau pemikiran patriotik. Selanjutnya adalah bagaimana pemimpin tersebut mempertahankan takhta yang dimilikinya? Adalah dengan membuat kelompok-kelompok kunci di ruang lingkup domestik untuk tetap mendukung rezim yang tengah berjalan. Sehingga, kelompok tersebut tidak berusaha untuk merbut kekuasaan baik secara paksa maupun melalui prosedur yang legal⁴⁵. Oleh sebab itu, para pemimpin politik mempertimbangkan *cost* dan *opportunities* dari politik domestik, apalagi yang memiliki implikasi langsung

⁴³ Jean-Marc F. Blanchard and Norrin M. Ripsman, "A Political Theory of Economic Statecraft," *Foreign Policy Analysis* 4, no. 4 (2008): 371-98. doi:10.1111/j.1743-8594.2008.00076.x.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ A Political Theory of Economic Statecraft, hal. 377

terhadap posisi pemimpin tersebut dan juga *cost-opportunities* politik internasional dari seluruh usaha untuk mempengaruhi secara ekonomi⁴⁶. Namun, bukan berarti *cost-opportunities* dalam konteks ekonomi tidak mempengaruhi sama sekali. Namun, apabila dikombinasikan dengan faktor politik tentang bagaimana mungkin kemungkinan untuk ‘menuruti’ permintaan negara pemberi dapat mempengaruhi dukungan politik dan posisi tawar dari pemimpin tersebut.⁴⁷

Sehingga, ada dua implikasi dari asumsi mengenai posisi tawar kekuatan seorang pemimpin tersebut. Yang pertama, pengaruh ekonomi yang timbul dari target pemerintah tersebut harus lebih rendah dari *cost-benefit* sektor politik yang akan di timbulkan oleh *economic statecraft* tersebut. Kedua, kemampuan negara pengguna *economic statecraft* akan sepenuhnya tergantung kepada pembawaan dan institusi politik domestik dari negara target⁴⁸. Dua faktor ini adalah apa yang disebut oleh *stateness* yang akan diukur secara kualitatif dan konseptualisasi dalam tiga komponen: (1) otonomi, (2) kapasitas, dan (3) legitimasi.

a. *Decision-Making Autonomy*

Apa yang dimaksud dari faktor otonomi dalam proses pembuatan keputusan adalah kemampuan struktural dari pembuat kebijakan luar negeri untuk memilih dan mengimplementasikan sebuah kebijakan ketika dihadapkan oleh oposisi politik domestik. Faktor ini dapat dianalisis dari struktur institusional, prosedur dari pembuat keputusan dan norma prosedural yang mempengaruhi situasi pengambilan keputusan domestik. Serta apakah ada kebebasan seorang

⁴⁶ *ibid.*

⁴⁷ Bruce W. Jentleson and Christopher A. Whytock, "Who "Won" Libya? The Force-Diplomacy Debate and Its Implications for Theory and Policy," *International Security* 30, no. 3 (Winter 2005/06): 47-86.

⁴⁸ Peter Evans, "The Eclipse of The State? Reflections on Stateness in an Era of Globalisation," *World Politics* 50 (October 1997): 62-87.

pemimpin secara absolut atau terbatas dalam menentukan suatu kebijakan luar negeri didalamnya, menjadi elemen yang penting dalam pengukuran tingkat otonomitas pemimpin. Tabel 1.2 akan mendeskripsikan pertanyaan penuntun untuk mengevaluasi satu unsur dari stateness, yakni otonomi pengambilan keputusan berdasarkan faktor-faktor beserta komponen/ aspek yang telah disebutkan di kalimat sebelumnya.

Tabel 1.2 Evaluasi Terhadap Stateness Negara; DM Autonomy

Faktor	Komponen/ Aspek	Pertanyaan Petunjuk untuk Mengukur Stateness
Otonomi dalam Pembuatan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur institusional • Prosedur pembuatan keputusan • Norma prosedural 	1) Adakah pemisahan kekuasaan atau konsentersasi dari power? Singkatnya, apakah pemimpin mendominasi pembuatan keputusan, kekuatan militer atau aktor lainnya sebagai veto player dalam pembuatan kebijakan luar negeri? 2) Apakah partai lain mengontrol institusi lain dalam pemerintahan? 3) Apakah ada prosedur politik yang memfasilitasi tindakan otonomi yang dilakukan executive leader? 4) Apa norma dalam membangun kebijakan luar negeri mendorong kebebasan penguasa dalam isu-isu luar negeri? Ataukah sebaliknya?

Sumber: Diolah dari *A Political Theory of Economic Statecraft* Appendix. I.

b. Capacity

Negara dengan kapasitas/ kemampuan besar dapat menggunakan berbagai macam instrumen kebijakan untuk membungkam oposisi yang dapat ditimbulkan oleh sanksi atau insentif tersebut. Kapasitas dimaksud adalah sumber kebijakan dari sebuah negara yang dapat mempengaruhi kemampuan negara tersebut memobilisasi kunci dari kelompok masyarakat dalam menghadapi economic statecraft, termasuk kekuasaan negara terhadap kekayaan finansial, birokrasi yang tertata, instrumen paksaan, dan berbagai macam mekanisme untuk mempengaruhi

atau mengontrol masyarakat⁴⁹. Selanjutnya terdapat dua macam kapasitas yang dapat dimiliki negara untuk mempengaruhi tingkatan statenessnya yaitu kapasitas ekonomi dan kapasitas koersi (untuk menekan) karena dua faktor ini berinterelasi.

Tabel 1.3 Evaluasi Terhadap Stateness Negara; *Capacity*

Faktor	Komponen/Aspek	Pertanyaan Petunjuk untuk Mengukur Stateness
Kapasitas (Ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> • Kekayaan finansial Negara • Budget Negara • Tatanan birokrasi • Instrumen koersi 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Seberapa besar budget relatif pemerintah terhadap GDP? 2) Apa pemasukan pajak pemerintah mengalami surplus? 3) Apakah ada sumber selain pajak (non-tax) yang dapat digunakan oleh pemerintah? Seperti kemampuan untuk melakukan pinjaman, memainkan kurs uang, cadangan emas, penjualan sumberdaya alam, bantuan luar negeri, dan lain lain. 4) Adakah instrumen kebijakan dan jaringan yang dimiliki oleh pemerintah dan dapat digunakan untuk memaksa, co-opt atau menanggulangi permasalahan tersebut? (contohnya kepemilikan dari perusahaan milik negara, pengeluaran untuk R&D, licensing, kontrol dari pemerintah, penasihat bisnis-pemerintah, persatuan buruh yang mendominasi dll.
Kapasitas (Koersi)		<ol style="list-style-type: none"> 1) Seberapa besar cakupan kepolisian setempat terhadap populasi dan teritori di negara target? 2) Adakah kapasitas militer yang dapat digunakan untuk kepentingan lain? 3) Sampai dengan tahap apa badan intelijen menembus lapisan masyarakat?

Sumber: Diolah dari *A Political Theory of Economic Statecraft* Appendix. I.

c. Legitimacy

⁴⁹ Stephen D. Krasner, *Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy*. (Princeton, N. J: Princeton University Press, 1978).

Legitimasi adalah ukuran dari pengakuan kelompok-kelompok domestik terhadap sebuah pemimpin untuk memimpin, menghormati otoritas negara dan menghargai mereka. Semakin besar legitimasi yang dimiliki negara, maka semakin besar kemampuannya untuk bekerja sama dengan kelompok kepentingan, key social actors (seperti labor union dan bisnis-bisnis besar) dan juga populasi untuk menolak tekanan dari luar. Biasanya, negara yang memiliki legitimasi yang tinggi bisa meyakinkan kelompok-kelompok ini untuk menerima economic losses demi kepentingan negara dan bangsanya. Dibandingkan menggunakan kekerasan untuk memaksakan ide yang dimiliki negara tersebut.

Tabel 1.4 Evaluasi Terhadap Stateness Negara; *Legitimacy*

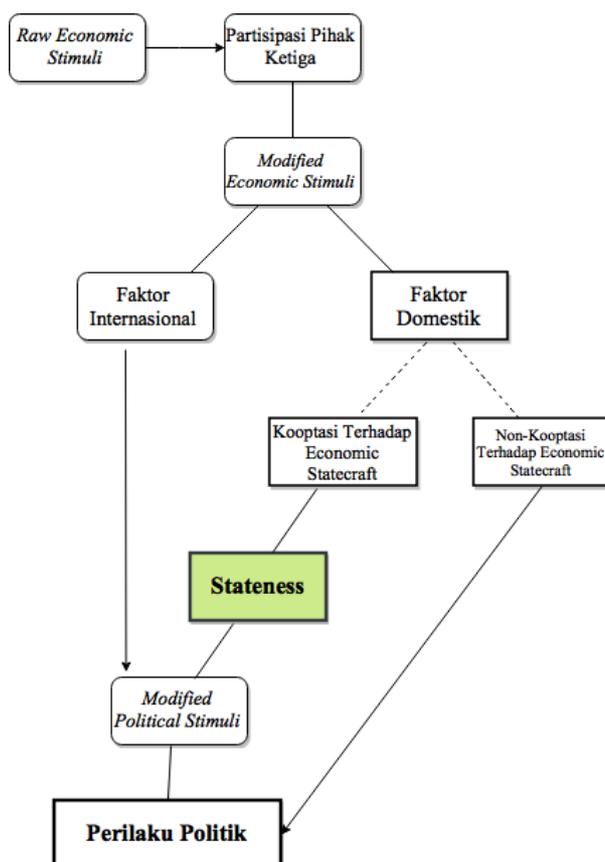
Faktor	Komponen/ Aspect	Pertanyaan Petunjuk untuk Mengukur Stateness
Legitimasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengakuan kelompok domestik terhadap pemerintahan pemimpin • Penghargaan terhadap otoritas negara 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Apakah ada banyak kekerasan sistematis dari para pembangkang? 2) Apakah ada banyak emigrasi dari negara target? 3) Apakah negara mengandalkan pengekangan sistematis? 4) Adakah indikator yang memperlihatkan sejauh mana dukungan publik terhadap rezim? 5) Adakah indikator yang memperlihatkan sejauh mana dukungan publik terhadap pemimpin?

Sumber: Diolah dari *A Political Theory of Economic Statecraft* Appendix. I.

Ketiga input ini akan menentukan tingkatan dari stateness yang dimiliki sebuah negara. *Stateness* merupakan indikator pengukuran politik domestik yang lebih komprehensif untuk melihat kemampuan dari negara target untuk menolak *economic statecraft* (*warfare* maupun *aid*) dari negara penerima. Blacard dan Ripsman menawarkan dua model sederhana untuk diaplikasikan, model pertama adalah model yang dapat digunakan apabila otoritas negara memilih menolak

economic statecraft, dan model kedua merupakan model dimana pemerintah memilih untuk tunduk terhadap *economic statecraft*. Dalam konteks Vladimir Putin di Russia, maka penulisan ini akan menggunakan model jenis pertama untuk menganalisis lebih lanjut.

Gambar 1.1 Teori Politik *Economic Statecraft* (Mempengaruhi Sikap Domestik)



Diolah kembali dari: Blanchard dan Ripsman

dalam *A Political Theory of Economic*

Statecraft, hlm. 381.

Raw economic stimuli adalah stimulus awal dari negara pengirim kepada negara target, serta bagaimana gambaran awal dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh pelaksanaan *economic statecraft* secara aktual ataupun potensial tersebut. Sedangkan, *modified economic stimuli* adalah campur tangan dari pihak ketiga untuk menambah stimuli tersebut menjadi lebih parah atau membantu meringankan stimuli tersebut⁵⁰.

Stimuli ini merupakan pokok pertimbangan dari para pembuat kebijakan dan juga kelompok domestik. Pembuat kebijakan tidak merespon langsung, melainkan menghitung imbasnya terhadap politik internasional dan domestik terlebih dahulu.

⁵⁰ *A Political Theory of Economic Statecraft*, hal. 380.

Dalam level internasional, pemerintah mempertimbangkan tiga aspek dalam menentukan respon terhadap sanksi/insentif tersebut (1) situasi geopolitik, (2) dukungan dari pihak ketiga, dan (3) adanya tekanan politik atau sanksi non-ekonomi⁵¹. Faktor internasional dalam tulisan ini hanya menjadi pendukung untuk menjustifikasi model, dari pembuatan keputusan yang menggunakan pertimbangan *cost-benefit* dari politik domestik. Kemudian, kelompok domestik menentukan apakah mereka tunduk terhadap opportunity dan cost yang disebabkan oleh *economic warfare* ini, manifestasi dari keputusan inilah yang menjadi indikator dari *domestic political cost* yang dipertimbangkan para *policymaker*.

Karena *stateness* adalah faktor yang menentukan *bagaimana political behaviour* sebuah negara dalam menghadapi *economic statecraft* yang nantinya akan menjadi output dari sebuah kebijakan, maka diperlukan instrumen untuk mengukur ketiga input ini. Kemudian, Blanchard memberikan guidelines berupa pertanyaan-pertanyaan untuk membimbing penulis lain dalam mengukur tingkatan *statecraft* negara yang sedang diteliti. Untuk memudahkan pemahaman, penelitian ini akan merangkum input – aspek dan juga pertanyaan untuk menguji *stateness* sebuah negara dalam sebuah tabel yang terdapat dimasing-masing sub-bab sebelumnya.

Blanchard dan Ripsman lalu mengkategorikan tingkatan dari hasil pertanyaan di atas kedalam kategori rendah, sedang dan tinggi baik dari sisi otonomi, kapasitas maupun legitimasi. Setelah itu mereka mengatakan bahwa semakin tinggi *stateness* sebuah negara (dari hasil pertambahan ketiga input

⁵¹ Economic Statecraft and Foreign Policy: Sanctions, Incentives and Target State Calculations, hal. 36.

tersebut) maka semakin tinggi resistensi negara tersebut dalam mematuhi economic statecraft dari negara/ institusi pengirim, begitu pula sebaliknya. Namun, apabila terjadi skenario dimana sebuah negara hanya memiliki setidaknya satu dari tiga input di level ‘tinggi’ maka negara disebut masih memiliki *significant stateness* – kemampuan yang cukup. Begitu juga ketika ada skenario ketika ketiga input tersebut sama-sama ada di level medium, maka terbilang pula signifikan. Lain lagi dengan skenario dimana sebuah negara hanya memiliki satu input di level medium dan lainnya di tingkat rendah, maka negara tersebut masuk dalam kategori *insufficient stateness*, yang niscaya akan kalah terhadap oposisi domestik dan mematuhi economic statecraft negara pengirim⁵². Meski tergolong mengoversimplikasi kondisi-kondisi yang ada, namun peneliti menggunakan teori ini karena terbukti dapat menggambarkan dinamika politik domestik Federasi Rusia yang dapat menentukan perilaku negara kedalam dimensi eksternal dan begitupula sebaliknya.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang secara umum merujuk pada pengumpulan data dan strategi atau teknik analisis data yang berujung kepada data non-numerik⁵³. Selanjutnya, metode kualitatif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, isu-isu ataupun proses sosial yang berfokus terhadap makna (*meanings*) dan juga pemahaman (*understanding*)⁵⁴.

⁵² A Political Theory of Economic Statecraft, hal. 383 – 384.

⁵³ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*(Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 63

⁵⁴ *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, hlm. 62

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti yang menggunakan metode kualitatif mengumpulkan data dengan memeriksa berbagai macam dokumen-dokumen, mengobservasi sikap atau mewawancarai narasumber⁵⁵. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini hanya teknik pengumpulan data berbasis dokumen (*document-based research*) atau studi literatur dan studi pustaka. Sehingga, di dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data dari buku, dokumen, laporan resmi maupun artikel-artikel dan menganalisa data-data tersebut secara detail yang pada akhirnya akan menghasilkan deskripsi dari sebuah permasalahan. Kemudian, penulis juga menggunakan akses teknologi untuk mendapatkan informasi agar memudahkan peneliti mencari berita-berita mengenai situasi terkini dari media-media dan sumber yang memiliki integritas dalam publikasinya.

Selanjutnya, penulis akan meninjau dan menyusun seluruh sumber data yang valid kedalam beberapa kategori agar memudahkan proses analisis⁵⁶. Penyusunan data dilakukan dengan cara mereduksi data-data yang ada terlebih dahulu untuk membuatnya lebih mudah di akses dan dimengerti oleh peneliti dengan cara membuat rangkuman, membangun kategori serta mengidentifikasi isu-isu. Setelah itu, data ditampilkan lagi setelah melalui proses reduksi untuk dianalisis dan ditransformasi kan kedalam tabel maupun grafik bila diperlukan⁵⁷.

⁵⁵ John W. Creswell, *Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1998), hlm. 36-39.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Bruce L. Berg and Howard Lune, *Qualitative research methods for the social sciences*, 4th ed. (Boston: Pearson, 2001), hlm. 35-36.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penyusunan aspek-aspek penelitian didalam laporan ini akan menggunakan sistematika secara runtut sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan. Bab ini akan memaparkan komponen-komponen awal dari sebuah penelitian adalah Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah yang didalamnya mencakup pembatasan dan rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian yang didalamnya mencakup metode penelitian dan teknik pengumpulan data dan yang terakhir adalah Sistematika Pembahasan.

Bab II – Stateness Level Federasi Rusia. Pada bab ini peneliti akan melakukan pembahasan penuh mengenai *stateness level* Federasi Rusia. Mulai dari *stateness* Federasi Rusia, lalu masuk ke kajian unsur *stateness* terhadap situasi empiris Federasi Rusia, yang terdiri dari tiga sub-bab yaitu otonomi pengambilan keputusan, kapasitas dan legitimasi. Selanjutnya adalah significant *stateness* dari Federasi Rusia.

Bab III – Implementasi *Economic Warfare* Amerika Serikat terhadap Rusia Tahun 2014. Didalam bab III, penulis akan memaparkan implementasi *economic warfare* yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Baik dari segi esensi, strategi dan tujuannya secara umum dilakukan ke negara-negara targetnya maupun perihal aneksasi Krimea yang dilakukan oleh Federasi Rusia pada tahun 2014. Kemudian, eksekusi sanksi ekonomi Amerika Serikat ke Federasi Rusia Tahun 2014 dan pengaruh implementasi *economic warfare* tersebut terhadap Federasi Rusia.

Bab IV – Respon Politik Luar Negeri Federasi Rusia Terhadap *Economic Warfare* Amerika Serikat Berkaitan Dengan *Stateness Level*. Bab ini menjabarkan analisis dari faktor-faktor resistensi dengan menggunakan teori politik dari *economy warfare* dan konsep *stateness* sebagai faktor kunci internal yang menentukan perilaku politik sebuah negara. Juga beberapa faktor eksternal yang dinilai berkontribusi besar dalam penerapan strategi tersebut. Yang terdiri dari 6 sub-bab yaitu: Sifat Dasar *Economic Warfare* dalam Perspektif Umum, asesmen empiris aneksasi Federasi Rusia pada tahun 2014, *stateness* Federasi Rusia dalam menghadapi *economic warfare* Amerika Serikat, Intervensi Faktor-faktor eksternal terhadap stimulus politik, dan Resistensi Rusia terhadap sanksi ekonomi Amerika Serikat.

Bab V kemudian akan berisi mengenai simpulan, yaitu temuan peneliti yang diperoleh selama proses menganalisis penelitian ini dan saran mengenai bagaimana penelitian yang serupa kemudian dapat diteliti lebih lanjut.